



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
FAKULTAS EKONOMI  
JAKARTA**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM MONITORING PELAPORAN  
PEMBAYARAN PAJAK (MP3), KESADARAN WAJIB PAJAK DAN  
TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA TAHUN 2011**

**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : YANG YANG**

**NIM : 125070523**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR  
SARJANA EKONOMI  
2011**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
FAKULTAS EKONOMI  
JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : YANG YANG  
NIM : 125070523  
JURUSAN : AKUNTANSI  
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SISTEM MP3, KESADARAN  
WAJIB PAJAK DAN TINGKAT PENDIDIKAN  
WAJIB PAJAK YANG MEMPENGARUHI  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
TAHUN 2011

Jakarta, 10 Juni 2011  
Pembimbing

Dr. Heryanto S. Gani, SE., M.Si., Ak., CPA

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**JAKARTA**

- (A) Yang Yang (125070523)
- (B) PENGARUH PENERAPAN SISTEM MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3), KESADARAN WAJIB PAJAK DAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA TAHUN 2011
- (C) xi+76 hlm; 2011; Tabel 27 ; Gambar 1
- (D) Akuntansi Perpajakan
- (E) Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti apakah penerapan sistem MP3, kesadaran WP dan tingkat pendidikan WP berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP secara parsial maupun simultan. Penelitian dilakukan terhadap WPOP yang telah mempunyai NPWP dan tinggal di Indonesia dengan menggunakan kuisioner. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 91 sampel dan dalam mengolah data secara statistik menggunakan bantuan *software IBM SPSS Statistics 19*. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Data yang terkumpul, sebelum dilakukan pengujian hipotesis, diolah terlebih dahulu dengan menggunakan uji kualitas data dan uji asumsi klasik serta statistik deskriptif. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi dengan tingkat keyakinan 95%. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penerapan sistem MP3 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP, sedangkan kesadaran WP dan tingkat pendidikan WP berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP sedangkan penelitian secara simultan menunjukkan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian dengan menambah variabel lain dan menambah jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian.
- (F) Daftar Pustaka 11 (1999 - 2011)
- (G) Dr. Heryanto S. Gani, SE.,M.Si.,Ak.,CPA

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Perumusan Masalah.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka .....	8
1. Perpajakan .....	8
a. Definisi .....	8
b. Fungsi Pajak .....	9
c. Asas Pemungutan Pajak .....	9
d. Sistem Pemungutan Pajak .....	10
e. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak .....	11
f. Pembukuan atau Pencatatan.....	12
g. Sanksi Perpajakan .....	12

2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) .....	13
a. Definisi .....	13
b. Pengertian .....	14
c. Jenis – Jenis Kepatuhan .....	15
3. Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) .....	15
a. Definisi .....	15
b. Cara kerja pelaporan pembayaran pajak dengan menggunakan sistem MP3 .....	17
c. Pengaruh penerapan sistem MP3 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) .....	18
4. Kesadaran Wajib Pajak.....	19
a. Definisi .....	19
b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).....	19
5. Tingkat Pendidikan Wajib Pajak .....	20
a. Definisi .....	20
b. Pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) .....	21
6. Hasil Penelitian Terdahulu .....	21
B. Kerangka Pemikiran .....	22
1. Identifikasi Variabel .....	23
2. Definisi Variabel .....	24

3. Hipotesis .....	25
--------------------	----

### BAB III. METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Obyek Penelitian .....	27
B. Metode Penarikan Sampel .....	27
1. Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel .....	27
2. Operasionalisasi Variabel .....	28
C. Teknik Pengumpulan Data .....	30
1. Penelitian Kepustakaan .....	30
2. Penelitian Lapangan .....	30
D. Teknik Pengolahan Data .....	31
1. Statistik Deskriptif .....	32
2. Uji Kualitas Data .....	32
a. Uji Validitas .....	32
b. Uji Reliabilitas .....	33
3. Uji Asumsi Klasik .....	33
a. Uji Normalitas .....	34
b. Uji Multikolinearitas .....	34
c. Uji Heterokedastisitas .....	35
E. Teknik Pengujian Hipotesis .....	35
1. Uji t ( <i>Test Of Significant</i> ) .....	36
2. Uji F ( <i>ANOVA</i> ) .....	36
3. Uji Koefisien Determinasi ( Uji $R^2$ ) .....	37

## BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	38
B. Analisis dan Pembahasan .....	38
1. Statistik Deskriptif .....	38
a. Statistik Deskriptif Kuisisioner .....	38
b. Statistik Deskriptif Responden .....	42
c. Statistik Deskriptif Data .....	44
2. Pengujian Kualitas Data .....	48
a. Uji Validitas .....	49
b. Uji Reliabilitas .....	53
3. Pengujian Asumsi Klasik.....	56
a. Uji Normalitas .....	56
b. Uji Multikolinearitas .....	58
c. Uji Heteroskedastisitas .....	60
4. Pengujian Hipotesis dan intepretasi hasil .....	62
a. Uji t ( <i>test of significant</i> ) .....	63
I. Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak .....	64
II. Kesadaran Wajib Pajak .....	65
III. Tingkat Pendidikan Wajib Pajak .....	67
b. Uji F ( <i>ANOVA</i> ).....	68
c. Uji Koefisien Determinasi (uji $R^2$ ) .....	70
d. Persamaan Regresi Berganda.....	70

e. Variabel Dominan .....	72
---------------------------	----

**BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	74
---------------------	----

B. Saran .....	75
----------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LITERATUR**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pajak menjadi andalan utama bagi sebuah negara yang mempunyai tekad kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Tanpa adanya pemasukan pajak, maka negara tidak dapat berbuat apa-apa. Idealnya, semakin maju suatu negara, kesadaran akan pentingnya membayar pajak semakin tinggi yang ditandai dengan tingginya *tax ratio*, sehingga penting pemerintah untuk mencari cara agar meningkatkan *tax ratio*. Semakin tinggi *tax ratio* semakin tinggi juga penerimaan negara. Hal ini ditunjukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Peningkatan – peningkatan tersebut diharapkan terus berlangsung sampai APBN benar-benar menjadi mandiri dan pajak diharapkan menjadi pendukung kemandirian tersebut.

Dalam rangka meningkatkan *tax ratio* dan mewujudkan APBN yang mandiri, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan strategi antara lain: Tingkatkan Kepatuhan Perpajakan Masyarakat. Untuk mengimplementasikan strategi tersebut, maka perlu dilakukan reformasi perpajakan secara total, salah satunya dengan melakukan pembaharuan administrasi perpajakan dengan mengedepankan sistem informasi perpajakan yang serba canggih dan terbuka

Menyadari akan kelemahan sistem administrasi yang berlaku dan fakta bahwa pada era modern sekarang ini penggunaan internet merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan, hamper setiap orang memiliki koneksi internet

melalui perangkat *mobile* sampai *Personal Computer* bahkan penggunaan internet melalui warung internet (warnet). Berdasarkan data dari internetworldstats.com (Tabel 1.1) jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, maka DJP mengambil langkah pembaharuan dengan menggabungkan kecanggihan sistem informasi dengan pembaharuan sistem administrasi perpajakan dengan menerapkan sistem pembayaran dengan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dalam bentuk *e-payment*.

Tabel 1.1 Statistik Pengguna Internet dan Populasi di Asia

ASIA INTERNET USAGE AND POPULATION						
ASIA	Population (2010 Est.)	Internet Users (Year 2000)	Internet Users (Latest Data)	Penetration (% Population)	User Growth (2000-2010)	Users (%) in Asia
<a href="#">Afghanistan</a>	29,21,355	1 000	1,000,000	3.4 %	99,800.0 %	7.1 %
<a href="#">Armenia</a>	2,967,072	20 000	200,200	7.0 %	75.7 %	7.0 %
<a href="#">Azerbaijan</a>	8,200,512	12 000	3,609,000	44.1 %	20,811.7 %	3.4 %
<a href="#">Bangladesh</a>	158,265,841	100 000	6 17,300	0.4 %	517.3 %	0.1 %
<a href="#">Bhutan</a>	22,847	500	50,000	7.1 %	12,00.0 %	10.0 %
<a href="#">Brunei Darussalam</a>	44,017	211000	318,900	81.4 %	94.1 %	11.1 %
<a href="#">Cambodia</a>	14,757,320	6 000	78,000	0.5 %	1,200.0 %	7.0 %
<a href="#">China *</a>	1,380,141,235	22,500,000	120,000,000	8.6 %	1,766.7 %	50.9 %
<a href="#">Georgia</a>	4,411,875	211000	1,300,000	29.3 %	6,400.0 %	17.4 %
<a href="#">Hong Kong *</a>	7,205,735	2,300,000	1,070,713	60.0 %	113.7 %	3.6 %
<a href="#">India</a>	1,143,705,015	5,000,000	81,000,000	6.9 %	1,620.0 %	3.8 %
<a href="#">Indonesia</a>	242,966,342	2,700,000	30,000,000	12.3 %	1,400.0 %	3.6 %
<a href="#">Japan</a>	126,004,170	47,700,000	99,103,700	78.3 %	110.5 %	10.0 %
<a href="#">Kazakhstan</a>	15,460,134	70 000	5,300,000	34.3 %	7,471.4 %	3.6 %

(sumber: internetworldstats.com)

Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) merupakan sistem administrasi canggih, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan jasa kepada Wajib Pajak (WP), melalui kemudahan pelayanan, administrasi dan transparansi kedua belah pihak sehingga memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tujuan untuk menghasilkan penerimaan pajak yang lebih meningkat. Penerapan sistem ini diharapkan meningkatkan kepatuhan WP. Penelitian yang dilakukan oleh Lasmana, Narsa, dan Sawarjuwono (2005) menemukan bahwa sistem MP3 berpengaruh terhadap kepatuhan WP.

Kesadaran WP untuk membayar pajak masih sangat rendah, hal ini ditandai dengan data yang bersumber dari DJP (tabel 1.2) dan menurut Tjiptardjo dalam kompas.com tahun 2010/1/4, mengemukakan bahwa pada tahun 2007 hanya 6,6 juta jiwa yang terdaftar sebagai WP, pada tahun 2008 sebanyak 10,68 juta jiwa yang terdaftar, sedangkan di tahun 2009 menjadi 15,91 juta jiwa yang terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Tabel 1.2 Data Wajib Pajak Dari Tahun 2002-2007

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<b>WP Badan</b>						
Terdaftar	941.038	1.031.624	1.116.224	1.207.653	1.337.637	1.358.022
Efektif	795.451	882.253	964.122	1.054.127	1.137.752	1.268.739
<b>WPOP</b>						
Terdaftar	2.112.896	2.426.110	2.728.947	2.999.109	3.330.821	5.336.214
Efektif	1.986.108	2.263.492	2.564.735	2.829.251	2.876.911	5.144.748
<b>Total WP badan &amp; OP</b>						
Terdaftar	3.053.934	3.457.734	3.845.171	4.206.762	4.668.458	6.694.236
Efektif	2.781.559	3.145.745	3.528.857	3.883.378	4.014.663	6.413.487

Sumber: Direktorat Teknik Informasi Perpajakan (05 Pebruari 2008)

Sekilas memang mengalami kenaikan dari segi jumlah, tetapi jika dilihat dari persentase pembayar pajak atau yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan total jumlah penduduk di seluruh Indonesia yang pada sensus penduduk tahun 2010 menurut Biro Pusat Statistik (BPS) (Tabel 1.3) mencapai 237,641,326 jiwa maka persentase-nya hanya berkisar  $\pm 6,7\%$  di tahun 2009. Sungguh kecil jumlah pembayar pajak di Indonesia, untuk itu masyarakat luas harus sadar akan pentingnya pembayaran pajak untuk pembiayaan negara dan ini merupakan tantangan bagi pemerintah melalui DJP, untuk harus terus melakukan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan WP. Disisi lain pemerintah juga harus memberikan bukti konkrit kepada masyarakat atas pajak

yang telah dibayarkan. Penelitian yang dilakukan Muliari dan Setiawan (2011) menemukan bahwa kesadaran WP berpengaruh terhadap kepatuhan WP.

Tabel 1.3 Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010

Tahun 2010	Jumlah Penduduk		Total
	Laki-laki/Male	Perempuan/Female	
Indonesia	119,630,913	118,010,413	237,641,326

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS)

Setiap WP mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda dengan WP lainnya, namun secara umum WP yang tingkat pendidikan-nya lebih tinggi, lebih mudah memahami peraturan perpajakan yang berlaku sehingga diharapkan WP yang lebih tinggi tingkat pendidikan-nya lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan Budi R. (2007) menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan WP.

Mengingat pentingnya permasalahan tersebut, maka diadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3), Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Tahun 2011.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi permasalahannya yaitu:

1. Penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis sistem informasi yang di sebut Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan media internet.

2. Kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah.
3. Tingkat pendidikan wajib pajak berbeda-beda dengan wajib pajak lainnya.

### **C. Ruang Lingkup**

Kepatuhan WPOP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi berbagai macam faktor, diantaranya seperti adanya sanksi perpajakan, kualitas layanan, kesadaran WP, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena banyaknya faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP tersebut, maka dalam penelitian ini hanya akan meneliti faktor penerapan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3), kesadaran Wajib Pajak dan tingkat pendidikan Wajib Pajak sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Tahun 2011.

### **D. Perumusan Masalah**

1. Apakah Penerapan Sistem MP3, kesadaran Wajib Pajak dan tingkat pendidikan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2011 baik secara parsial maupun simultan.
2. Faktor manakah dari Penerapan Sistem MP3, kesadaran Wajib Pajak dan tingkat pendidikan Wajib Pajak yang berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2011.

### **E. Tujuan dan Manfaat**

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian adalah untuk meneliti apakah Penerapan Sistem Monitoring MP3, kesadaran Wajib Pajak dan tingkat pendidikan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi baik secara parsial maupun simultan dan faktor mana yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Manfaat dibagi menjadi manfaat bagi pengembangan ilmu dan manfaat operasional. Manfaat bagi pengembangan ilmu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan tentang perpajakan yang ada di Indonesia dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi, terutama di bidang konsentrasi akuntansi perpajakan, serta dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang lebih lanjut dan lebih komprehensif. Manfaat operasional, diharapkan hasil penelitian ini memberikan wawasan kepada khalayak ramai tentang begitu penting-nya membayar pajak kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara dalam usaha untuk mensejahterakan rakyat.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan akan menguraikan secara garis besar setiap bab yang ada dalam penelitian ini, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, secara urutan bab-bab tersebut sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan

dan manfaat, serta sistematika pembahasan tentang isi menyeluruh penelitian ini.

**BAB II : LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang berisi landasan teori, hasil penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran yang berisi identifikasi, definisi variabel dan hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang pemilihan obyek penelitian, metode penarikan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian dan analisis pembahasan mengenai pengujian asumsi dalam model regresi dan pengujian hipotesis.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil analisis dan saran-saran yang diharapkan bermanfaat untuk kedepan-nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Estralita (2010). Akuntansi Perpajakan Edisi 2 Revisi, Jakarta: Salemba Empat
- Agus B.B.N. Y.; Boenjamin, Puspahadi; Hakim, Lukman Nasution; Muzakir; Nasser, Nasmel dan Nasser, Abdul (2011). Himpunan Undang – Undang Perpajakan Indonesia, Jakarta: Grasindo
- Mardiasmo (2009). Perpajakan Edisi Revisi 2009, Yogyakarta: Andi Offset
- Poerwadarminta, W.J.S (1999) Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Priyatno, Duwi (2010). Teknik Mudah Dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS Dan Tanya Jawab Ujian Pendaran, Yogyakarta: Gava Media
- Resmi, Siti (2009). Perpajakan: Teori dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, Singgih (2011). *Mastering SPSS* versi 19, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suandy, Erly (2008). Perencanaan Pajak Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat
- Supranto, J. (2003). Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran, Edisi Revisi Ke-7, Jakarta: Rineka Cipta
- Syarif, Agus (2007). Perpajakan Edisi Revisi, Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Waluyo. (2008). Perpajakan Indonesia Edisi 9, Jakarta: Salemba Empat.



## LITERATUR

- Anonim, (2010). Wajib Pajak Tahun 2009 Melonjak 50 Persen. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/04/15552171/Wajib.Pajak.Tahun.2009.Melonjak.50.Persen>
- \_\_\_\_\_, (2011). *Asia Internet Usage and Population*. <http://internetworldstats.com/stats3.htm#asia>
- \_\_\_\_\_, (2000). “Ditjen Pajak meluncurkan sistem MP3”. <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F27157/Ditjen%20Pajak%20luncurkan%20sistem%20MP3.htm>
- Biro Pusat Statistik. (2010). Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010. Jakarta: BPS. <http://www.bps.go.id>
- Budi R., Ikhsan (2007). Kajian Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (3). Hal 288-310.
- Dewi, Rosdianah. (2010). Tahun 2008, Catat Tax Ratio Tertinggi 13,3%. <http://www.inilah.com/read/detail/476981/tahun-2008-catat-tax-ratio-tertinggi-133>
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak, No. KEP - 213/PJ./2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/Pj./2000. Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Yang Memenuhi Kriteria Tertentu Dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- \_\_\_\_\_, No. KEP - 162/PJ/2003 Tentang Pelaksanaan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Pada Direktorat Jenderal Pajak
- Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 544/KMK.04/2000. Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

\_\_\_\_\_, No. 235/KMK.03/2003. Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

\_\_\_\_\_, No. 296/KMK.03/2003 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/Kmk.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara.

\_\_\_\_\_, No. 5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Lasmana, Mienati Somya; Narsa, I Made dan Sawarjuwono, Tjiptohadi (2005). Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (2). Hal 130-158.

Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu Ery (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis (6). Hal 1-23.

*Organization for Economic and Cooperation Development, (2001) Compliance Measurement - Practice Note: 6*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No. 94/PMK.02/2005 Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara.

\_\_\_\_\_, NO. 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Santoso, Wahyu (2008). Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia). *Jurnal Keuangan Publik* (5). 85-137.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 02/PJ./2003 Tentang Pelaksanaan Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (Mp3) Secara *On-Line* Direktur Jenderal Pajak,

\_\_\_\_\_, No. Se - 2/PJ./2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Direktur Jenderal Pajak.

\_\_\_\_\_, No. SE – 89/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.

Tarjo dan Sawarjuwono, Tjiptohadi (2005). Kepercayaan Wajib Pajak terhadap *Fiskus*, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi, dan Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* (3). Hal 119-134.

<http://perpustakaan.bappenas.go.id/>

<http://www.bppk.depkeu.go.id>

<http://www.google.co.id/>

<http://www.klinik-pajak.com/>

<http://www.kwikisurveys.com/>

<http://www.kaskus.us/>

<http://www.oecd.org/>

<http://www.pajak.go.id/>

<http://www.ortax.org/>